



ONTOLOGI SOSIAL DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PUBLIK: IMPLIKASI BAGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Nadya Shafwah¹, Ruth Natalia Sianturi²,

1) nadyashafwah983@gmail.com, Universitas Nasional

2) ruth9421@gmail.com, Universitas Nasional

Abstract

Social ontology, as a study of the structure and nature of social reality, has significant implications in the context of public administration. A deep understanding of social ontology helps policymakers and public administrators understand complex social dynamics and interactions among various social actors. This article explores the main concepts in social ontology and how these concepts can be applied in public administration. By analyzing real cases, the article shows how social ontology can influence policy development, strategic planning, and public program implementation. Additionally, the article discusses the challenges faced in integrating social ontological perspectives into public administration practice and offers recommendations to enhance the effectiveness of public policy through this approach.

Keywords: *Ontology, Public administration, Public policy*

Abstrak

Ontologi sosial, sebagai studi tentang struktur dan sifat realitas sosial, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks administrasi publik. Pemahaman yang mendalam tentang ontologi sosial membantu pembuat kebijakan dan administrator publik dalam memahami dinamika sosial yang kompleks dan interaksi antara berbagai aktor sosial. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam ontologi sosial dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam administrasi publik. Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, artikel ini menunjukkan bagaimana ontologi sosial dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, dan implementasi program publik. Selain itu, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan perspektif ontologi sosial ke dalam praktik administrasi publik dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui pendekatan ini.

Kata Kunci: Administrasi publik, Kebijakan publik, Ontologi

PENDAHULUAN

Ontologi sosial merupakan cabang dari ilmu ontologi yang fokus pada pemahaman tentang entitas sosial dan hubungan antara mereka. Dalam konteks administrasi publik, ontologi sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis, memahami, dan mengelola masalah sosial yang kompleks. Menurut Irwansyah (2021) ontologi mempelajari tentang realitas yang bersifat tunggal, absolut dan abadi serta membahas keberadaan sesuatu bersifat konkret (Nurasa et al., 2022). Dalam konteks Administrasi publik, pemahaman tentang ontologi sosial penting karena menentukan cara pandang dan pendekatan terhadap pembangunan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dwight Waldo yang dikutip oleh Syafei (2003), berpendapat bahwa administrasi publik yaitu manajemen dan organisasi manusia untuk mencapai tujuan pemerintah (Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, 2020).

Teori ontologi administrasi publik berfokus pada hakikat administrasi publik. Dalam praktik, pemerintah yang efektif harus mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ontologi administrasi publik. Ontologi sosial merujuk pada pemahaman tentang realitas sosial, termasuk struktur, dan interaksi dalam masyarakat. Ontologi sosial menggambarkan cara pandang terhadap struktur dan dinamika kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antara pemerintah dan warga. Dengan memahami ontologi sosial dalam konteks administrasi publik, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun hubungan yang lebih inklusif antara pemerintah dan warga.

Ada beberapa isu terkait ontologi sosial dalam administrasi publik. Salah satunya adalah tantangan dalam mendefinisikan dan mengukur fenomena sosial, yang bisa bersifat kompleks,



dinamis, dan bergantung pada konteks. Hal lainnya adalah kebutuhan untuk memahami hubungan antara berbagai struktur dan proses sosial, bagaimana mereka berinteraksi untuk menghasilkan hasil sosial. Isu-isu ini mempunyai implikasi penting bagi pengembangan kebijakan. Misalnya, kebijakan yang didasarkan pada pemahaman yang tidak memadai mengenai realitas sosial mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

Selain itu, kebijakan yang gagal mempertimbangkan kompleksitas dan saling ketergantungan fenomena sosial dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sehingga melemahkan tujuan yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu mengembangkan pemahaman mendalam tentang ontologi sosial dan implikasinya terhadap pengembangan kebijakan melibatkan pengambilan wawasan dari berbagai ilmu, termasuk filsafat, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi dapat melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada pemahaman yang berbeda-beda dan sesuai konteks mengenai realitas sosial. Administrasi publik melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam mengembangkan kebijakan yang efektif, penting untuk memahami entitas-entitas sosial yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemahaman ontologi sosial sangat penting dalam pengembangan kebijakan publik. Membantu pemerintah dalam memahami struktur sosial dan hubungan antar entitas sosial, serta mempertimbangkan implikasi dalam pengembangan kebijakan. Dengan memahami ontologi sosial, peneliti berharap dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

KAJIAN PUSTAKA

Ontologi

Dalam bahasa Yunani, istilah ontologi berasal dari kata '*Ontos*' yang berarti yang ada dan '*Logos*' yang berarti ilmu, sehingga ontologi diartikan sebagai "ilmu yang membahas tentang keberadaan". Secara umum, ontologi adalah cabang filsafat yang berbicara tentang hakikat hidup tentang keberadaan, yang mencakup keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada (Rokhmah, 2021)

Dalam filsafat ontologi mempunyai pengertian, ontologi yaitu cabang yang mengeksplorasi makna eksistensi. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai bagian dari filsafat yang fokus pada kajian mengenai hakikat dari sesuatu (Nurhayati, 2023). Dalam konteks administrasi publik, ontologi sosial dapat digunakan untuk memahami dan mengorganisir konsep-konsep dan praktik yang terkait dengan administrasi publik.

Salah satu, implikasi utama dari ontologi sosial dalam administrasi publik adalah bahwa itu dapat membantu mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep dan praktik-praktik yang mendasar bagi administrasi publik. Misalnya, ontologi sosial dapat membantu mengidentifikasi konsep-konsep seperti "keputusan", "hukum", "kebijakan", dan "proses" sebagai bagian penting dari Administrasi Publik. Ini dapat membantu pengembang kebijakan untuk lebih memahami dan mengorganisir konsep-konsep dan praktik-praktik ini dalam konteks administrasi publik.

Menurut Soetriono & Hanafie (2007) Ontologi adalah dasar untuk mempraktikkan batasan dan ruang lingkup bentuk objek penelaahan obyek ontologis dari wawasan, serta pengertian tentang dasar realita dari obyek ontologis (Esih Qurnia Asih, 2023). Ontologi memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan kebijakan yang efektif, ontologi sosial berfokus pada analisis struktur dan relasi sosial yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dan organisasi.



Dalam sintesis, ontologi sosial ditemukan memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan kebijakan yang efektif dalam konteks administrasi publik, dengan memahami ontologi sosial dalam konteks administrasi publik, pengembang kebijakan dapat lebih memahami dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Hakikat Administrasi Publik

Dalam filsafat ilmu administrasi, pengembangan ilmu administrasi publik didasarkan pada sistem administrasi publik digunakan secara efektif untuk mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan publik. Ontologi memiliki keberadaan dalam ilmu pemerintah karena sebagai suatu ilmu berdasarkan ontologi menjadikan ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, karena berkaitan dengan konsep pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan rakyat (Muhammad Asad Imaduddin et al., 2024). Perlu bekerja di semua tingkatan pemerintahan dan menjalin kemitraan dengan institusi nirlaba serta organisasi non-pemerintah. Pendekatan millennium menuntut pertanggungjawaban dari petugas administrasi publik. Administrasi publik dimulai dengan memperbaiki sistem selama masa transisi seperti Indonesia diikuti oleh pelenturan sistem organisasi dan teknik yang sesuai dengan kondisi lingkungan (Fauzan, 2018).

Administrasi publik berusaha pada tahap penyelenggaraan pemerintahan kolektif menjadi kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui mekanisme kerja yang didukung oleh sumber daya manusia dan administrasi yang baik. Dalam mekanismenya partisipasi pemangku kepentingan pembangunan sangat penting, dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara harus didukung oleh pemangku kepentingan yang berkualitas. berdasarkan dasar ontologi akan terjadi secara alami dan kokoh, menjadi kesatuan dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Epistemologi mempengaruhi bagaimana ilmuwan administrasi publik memperluas ilmu tersebut di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memanfaatkan data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyesuaikan metodologi dengan situasi yang berkembang serta menggali informasi lebih mendalam. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ontologi sosial. Seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, biasanya berasal dari laporan, artikel ilmiah, buku, dan sumber lainnya yang tidak dihasilkan langsung oleh peneliti (Muhajir et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ontologi Sosial

Ontologis terkait dengan asumsi tentang objek atau realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Ontologi sosial didefinisikan sebagai studi tentang struktur, entitas, dan hubungan sosial dalam konteks spesifik. Dalam administrasi publik, ontologi sosial berfungsi untuk memahami peran entitas sosial dalam kebijakan publik, memiliki komponen ontologi sosial mencakup entitas sosial, atribut, hubungan, dan konteks sosial. Dengan memahami ontologi sosial, pengambil kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Penerapan ontologi sosial administrasi publik masih terus berkembang, dan diharapkan mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, konsep ontologi administrasi telah berhasil merubah cara pandang para praktisi administrasi. Awalnya, mereka berpikir bahwa kejadian dalam bentuk kerja sama dipengaruhi oleh kekuatan mistis, namun sekarang telah berubah menjadi



pola pikir yang lebih dipengaruhi oleh logika dan rasionalitas (Indra Muda, 2018).

Entitas sosial meliputi individu, kelompok, dan institusi yang terlibat dalam administrasi publik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman tentang interaksi sosial, pola perilaku, dan dinamika sosial dalam konteks administrasi publik. Ontologi sosial membantu pengambil kebijakan untuk memahami entitas-entitas sosial yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan menggunakan ontologi sosial, pengambil kebijakan dapat melakukan analisis dampak sosial yang lebih komprehensif. Mereka dapat memprediksi efek kebijakan pada entitas sosial yang berbeda dan mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

Mengidentifikasi keterkaitan dan ketergantungan antara entitas sosial dalam administrasi publik memungkinkan pengambil kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan pada satu entitas sosial dapat memengaruhi entitas sosial lainnya. Dengan memahami ontologi sosial, pengambil kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Mereka dapat melibatkan aktor-aktor sosial yang relevan dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kepentingan mereka secara lebih baik. Penerapan ontologi sosial dalam administrasi publik masih terus berkembang dan diharapkan mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Ontologi Dalam Ilmu Administrasi

Praja (1993) menjelaskan tentang ontologi, yaitu cabang teori yang membahas tentang hakikat dari sesuatu yang ada. Dalam konteks ini, ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu atau ilmu yang menyelidiki keadaan sesungguhnya dari suatu hal (Madjid, 2011). Ontologi dalam ilmu administrasi melibatkan dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu pengalaman terhadap kenyataan konkret dan pemahaman abstrak. Dalam pemikiran ontologi administrasi, kedua perspektif tersebut saling mendukung dalam menjelaskan dan membenarkan makna administrasi sebagai ilmu, kegiatan, atau lapangan kerja manusia. Ontologi administrasi mencakup kebenaran hakiki dari norma-norma ontologis administrasi, baik secara transendental maupun empiris. Secara substansial dan historis, ontologi merupakan bagian fundamental dari filsafat, karena eksistensi ontologi tidak terlepas dari peran filsafat. Dalam konteks ontologi ilmu administrasi, pemikiran dimulai dari pembuktian atau penyelidikan yang mendalam hingga inti permasalahan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi.

Secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu '*onto*' yang berarti benda yang ada, dan '*logos*' yang berarti ilmu tentang keberadaan dan hakikat-hakikatnya. Ilmu administrasi publik mempelajari tiga komponen utama kehidupan bernegara, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan publik seperti kebijakan publik, manajemen publik, pembangunan administratif, tujuan negara, dan etika dalam penyelenggaraan negara (Martono, 2019). Dengan demikian, dalam konteks ini, ontologi sosial membantu menentukan ruang lingkup penelitian dalam ilmu administrasi publik yang meliputi lembaga-lembaga atau organisasi publik, termasuk birokrasi pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam fungsi pemerintahan.

Ontologi sosial berperan dalam membedakan ilmu administrasi publik dari induknya, yaitu ilmu politik. Ilmu politik lebih berfokus pada konstitusi dan pengambilan keputusan politik, sedangkan ilmu administrasi publik berfokus pada bagaimana mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Ontologi sosial membantu menjelaskan perbedaan fokus dan objek kajian antara ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Implikasi dari ontologi sosial dalam pengembangan kebijakan publik cukup signifikan. Ontologi sosial dapat membantu dalam memahami realitas sosial yang ingin diatasi oleh kebijakan dan dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis struktur sosial, institusi, dan hubungan yang berkontribusi terhadap masalah. Pemahaman ini sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan tepat



sasaran.

Ontologi sosial berperan penting dalam menginformasikan proses implementasi kebijakan dengan membantu mengidentifikasi pemangku kepentingan utama serta peran dan hubungan mereka. Koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, ontologi sosial juga berkontribusi dalam evaluasi hasil kebijakan, memberikan dasar untuk menilai dampak kebijakan terhadap realitas sosial, dan menentukan apakah kebijakan telah mencapai tujuannya serta potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Di samping itu, ontologi sosial menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan memahami jaringan sosial dan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah dapat lebih efektif menyesuaikan kebijakan mereka dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang dominan dalam konteks sosial masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan.

Pengelolaan konflik melalui analisis ontologi sosial membantu mengidentifikasi potensi konflik dalam implementasi kebijakan, memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengelolanya. Pemahaman yang lebih baik tentang struktur sosial dan dinamika kekuasaan juga mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan, memungkinkan pengembangan solusi-solusi baru yang lebih efisien dan inklusif. Implikasi ontologi sosial dalam pengembangan kebijakan publik menekankan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara masyarakat dan organisasi. Kebijakan yang efektif harus memenuhi kepentingan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan mereka. Dengan demikian, ontologi sosial membantu memahami cara terbaik untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Contoh implementasi ontologi sosial dalam pengembangan kebijakan publik adalah dalam pengembangan kebijakan pembangunan daerah. Ontologi sosial membantu memahami bagaimana masyarakat dan organisasi berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diterapkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan dapat lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara etimologis, kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang berarti pelaksanaan dan penerapan (Maryam et al., 2022). Menurut Agustino (2016), implementasi kebijakan adalah proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan sering dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Implementasi kebijakan melibatkan distribusi hasil kebijakan kepada masyarakat sebagai target, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai sasarnya (Sofiyanti & Pramono, 2023).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wijayanti, 2016). Sehingga dapat diketahui bahwa unsur otonomi daerah merupakan implementasi ontologi sosial dalam pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam pengaturan urusan sendiri, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, demi memenuhi kepentingan rakyat.

Otonomi daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, walikota, dan unsur-unsur lainnya dari pemerintahan daerah. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Organisasi daerah memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan daerah untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menjalankan urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab daerah. Akibatnya, perangkat daerah peran dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di sisi lain, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan penegakan hukum adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi adalah urusan pemerintahan opsional. Diharapkan kualitas dan kinerja aparaturnya akan ditingkatkan dengan pembagian urusan pemerintahan ini dalam kerangka otonomi daerah.

Ontologi Dapat Mempengaruhi Praktik Administrasi Publik.

Ontologi memiliki peran penting dalam pengembangan administrasi publik. Ontologi dapat didefinisikan sebagai suatu struktur yang sistematis dan formal yang digunakan untuk mewakili pengetahuan dan konsep yang relevan dalam suatu domain tertentu. Dalam Administrasi Publik, ontologi menentukan pandangan dan interpretasi para ahli serta praktisi terhadap realitas, yang kemudian mempengaruhi kebijakan dan manajemen publik. Dengan kata lain, ontologi berperan besar dalam cara pengetahuan Administrasi Publik diperoleh dan dikembangkan (Tamrin, 2023). Di beberapa sumber, ontologi diterapkan dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan informasi serta proses administratif. Ontologi membantu dalam mengorganisasi dan mengelola informasi yang kompleks, sehingga memudahkan akses dan penggunaan data yang relevan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ontologi juga diterapkan dalam pengembangan *e-government* untuk meningkatkan akses informasi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.

Secara filosofis, ontologi digunakan untuk menganalisis peran ontologi dalam administrasi publik dan bagaimana ontologi dapat membantu dalam mengatasi masalah etika dan praktis dalam administrasi. Ontologi tentang keberadaan dan sifat realitas memiliki pengaruh signifikan pada praktik administrasi publik dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Membentuk landasan asumsi dan nilai. Ontologi mendasari asumsi dan nilai yang dianut oleh para administrator publik, mempengaruhi cara mendefinisikan masalah, merumuskan solusi, dan membuat keputusan. Contohnya, asumsi tentang sifat realitas sosial dapat memengaruhi cara administrator publik merancang program kesejahteraan.
2. Memandu pengambilan keputusan. Ontologi menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan informasi, yang penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam administrasi publik.
3. Mendukung akuntabilitas dan transparansi. Ontologi menyediakan dasar untuk akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik. Pemahaman yang jelas tentang sifat realitas memungkinkan administrator publik untuk menjelaskan tindakan mereka kepada publik dan untuk bertanggung jawab atas hasil.
4. Pengaruh pada Pemahaman Realitas Sosial. Ontologi mempengaruhi pemahaman kita tentang realitas sosial dan konstruksi pengetahuan. Dalam praktik administrasi publik, pemahaman ontologi yang berbeda dapat membawa implikasi yang signifikan dalam melihat dan mengatasi masalah sosial. Misalnya, ontologi yang mengakui pluralitas sosial dan konstruksi sosial mendorong pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan publik.
5. Pengaruh pada Pengambilan Keputusan. Ontologi mempengaruhi cara memahami dan memperoleh pengetahuan tentang dunia sosial. Dalam administrasi publik, pemahaman ontologi berbeda mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan isu



kebijakan, analisis, dan evaluasi kebijakan. Berbagai perspektif ontologis dapat membawa implikasi yang berbeda terhadap preferensi kebijakan dan prioritas tindakan.

Pemahaman ontologi sosial dapat meningkatkan efektivitas pengembangan kebijakan publik secara signifikan. Ontologi sosial membantu para pembuat kebijakan memahami realitas sosial yang mereka hadapi, memberikan wawasan tentang sifat entitas sosial, hubungan, dan interaksi mereka. Mereka dapat merancang kebijakan yang lebih selaras dengan realitas di lapangan. Ontologi sosial menekankan pentingnya konsep dan definisi yang jelas, analisis yang lebih baik terhadap fenomena sosial, peningkatan reflektivitas, pertimbangan etis yang lebih baik, pemahaman konteks sosial, identifikasi dampak sosial, keterlibatan kepentingan, serta peningkatan adaptabilitas kebijakan. Dengan memahami ontologi sosial, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Selain itu, ontologi sosial dapat membantu administrator publik mengidentifikasi mekanisme sosial yang mendorong hasil kebijakan. Mekanisme ini dapat mencakup hal-hal seperti norma-norma sosial, dinamika kekuasaan, dan lingkaran umpan balik. Dengan memahami mekanisme ini, administrator publik dapat merancang kebijakan yang menargetkan mereka secara langsung, yang mengarah pada hasil yang lebih efektif. Ontologi sosial juga dapat memberikan kerangka kerja untuk desain kebijakan yang lebih berlandaskan pada realitas sosial, serta mendorong reflektivitas dan mempertimbangkan implikasi etis dari kebijakan. Pendekatan ontologi mempengaruhi cara untuk memahami dan mendekati masalah pengangguran dalam analisis ekonomi dan sosiologis. Tetapi, Keputusan ontologis yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi respons mereka terhadap masalah pengangguran dan memberikan solusi (Syahadatin & Shaddiq, 2023).

PENUTUP

Simpulan

Ontologi sosial merupakan cabang dari ilmu ontologi yang fokus pada pemahaman tentang entitas sosial dan hubungan antara mereka terkait dengan administrasi publik. Salah satunya adalah tantangan dalam mendefinisikan dan mengukur fenomena sosial yang bisa bersifat kompleks, dinamis, dan bergantung pada konteks. Hal lainnya adalah kebutuhan untuk memahami hubungan antara berbagai struktur dan proses sosial, serta bagaimana mereka berinteraksi untuk menghasilkan hasil sosial. Isu-isu ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan. Ontologi tentang keberadaan dan sifat realitas memiliki pengaruh yang signifikan pada praktik administrasi publik, antara lain memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas dan transparansi, serta mempengaruhi pemahaman realitas sosial.

Pemahaman ontologi sosial dapat meningkatkan efektivitas pengembangan kebijakan publik dengan cara-cara yang signifikan. Ontologi sosial dapat membantu para pembuat kebijakan memahami realitas sosial yang mereka hadapi, memberikan wawasan tentang sifat entitas sosial, hubungan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi. Dengan demikian, mereka dapat merancang kebijakan yang lebih selaras dengan realitas di lapangan. Selain itu, ontologi sosial menekankan pentingnya konsep dan definisi yang jelas, analisis yang lebih baik terhadap fenomena sosial, peningkatan reflektivitas, peningkatan pertimbangan etis, memahami konteks sosial, mengidentifikasi dampak sosial, melibatkan pemangku kepentingan, dan meningkatkan adaptabilitas kebijakan. Dengan pemahaman ontologi sosial yang baik, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Saran

Dari hasil penelitian, ada saran bahwa untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, pemerintah harus memahami ontologi sosial dan implikasinya terhadap pengembangan



kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan hubungan antara entitas-entitas sosial. Selain itu, pemerintah harus melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada pemahaman yang beragam dan sesuai konteks mengenai realitas sosial. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, W. & A. A. N. (2020). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan*. 6(1), 71–81.
- Sofiyanti & Pramono. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Situbondo. *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, 225.
- Muhajir, I., DJASTUTI, I., & Ratnawati, I. (2013). *Analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan (studi pada pt. dok & perkapalan kodja bahari (persero) cabang Semarang)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Esih Qurnia Asih, H. P. & I. F. N. (2023). *Hakekat Ontologi Dalam Filsafat Ilmu Terhadap Perbankan Syariah*.
- Fauzan, H. S. (2018). Filsafat ilmu administrasi sebagai hakikat dan makna dalam keilmuan administrasi publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/272%0Ahttps://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/download/272/248>
- Indra Muda. (2018). *Ontologi Ilmu Administrasi Negara*.
- Madjid, U. (2011). Ilmu Administrasi Ditinjau Dari Aspek Ontologi Epistemologi dan Aksiologi. In *Visionern* (Vol. 5, Issue 3, pp. 374–394). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/541>
- Muhammad Asad Imaduddin, Budi Juliardi, Rus Yandi, Tesha Dwi Putri, Didik Suhariyanto, Debbie Yuari Siallagan, Era Prestoroika, Ade Putra Ode Amane, Meizi Fahrizal, F. (2024). *Pengantar ilmu pemerintah*.
- Nurasa, A., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). Tinjauan Kritis terhadap Ontologi Ilmu (Hakikat Realitas) dalam Perspektif Sains Modern. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 181–191. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.396>
- Nurhayati, S. E. (2023). *Menuju transformasi Sosial: Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan melalui pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam sistem layanan dan rujukan terpadu di kabupaten tegal*. 5(2), 84–97.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172–186. <https://ejournal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/124>
- Tamrin, M. H. (2023). Administrasi Publik dalam Pusaran Pluralisme Ontologis, Variasi Epistemologis. Serta Terobosan Metodologis Dan Aksiologis.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Syahadatin, M., & Shaddiq, S. (2023). Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045.
- Maryam, S., Nuswantari, & Kokotiasa, W. (2022). Impelementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKndalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMPNegeri 11 Madiun. *Senassdra, 1*, 538–546.



Martono, B. S. (2019). Tinjauan Yuridis Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi, 1(2), 101–111.
<https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.307>